

PEMBANGUNAN BERBASIS SEKTOR: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM EKONOMI, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR DAN KESEHATAN

Annisa Nursyahrani¹, Herli Andani², Masliatul Aini³, Nurhasanah Azizah⁴, Reihan Afriyandi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Djuanda. Jl. Tol Ciawi No.1 Kode Pos 16720

Korespondensi: andaniherli48@gmail.com

ABSTRAK

This research aims to compare sector-based development between Indonesia and Malaysia in the aspects of economy, education, health, and infrastructure. Using the literature study method, the author collected and analyzed data from various written sources. The results show that Malaysia has more stable and diversified economic growth, supported by pro-business investment policies. In education, Malaysia also excels with more equitable access, whereas Indonesia still faces challenges in education equity. Health indicators in Malaysia, such as life expectancy and maternal and child mortality rates, show better results compared to Indonesia, which still struggles to provide quality healthcare. Finally, infrastructure in Malaysia is more modern and integrated, while Indonesia experiences disparities in infrastructure development, especially in remote areas. This research provides a comprehensive overview of the challenges and advantages of each country, and offers a reference for formulating sustainable development strategies in Indonesia.

Keywords: Development, Comparison, Indonesia, Malaysia

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pembangunan berbasis sektor antara Indonesia dan Malaysia dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan terdiversifikasi, didukung oleh kebijakan investasi yang pro-bisnis. Dalam bidang pendidikan, Malaysia juga unggul dengan akses yang lebih merata, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pendidikan. Indikator kesehatan di Malaysia, seperti harapan hidup dan angka kematian ibu dan anak, menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan Indonesia, yang masih berjuang untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Terakhir, infrastruktur di Malaysia lebih modern dan terintegrasi, sementara Indonesia mengalami disparitas dalam pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan keunggulan masing-masing negara, serta menawarkan referensi untuk merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembangunan, Perbandingan, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses transformasi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan, diharapkan tercipta kesejahteraan yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal.

Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat. Keduanya sering disebut sebagai "serumpun" karena memiliki kesamaan dalam hal agama, budaya, dan bahkan asal-usul keturunan yang sama (Maimun Aqsha). Batas wilayah yang berdekatan, baik daratan di Pulau Kalimantan maupun perairan seperti Selat Malaka, Selat Sulawesi, dan Laut China Selatan, semakin mempererat hubungan kedua negara. Kerja sama bilateral pun terjalin erat dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN, G20, IORA, dan PBB, mencerminkan kedekatan dan sinergi yang terjalin di antara keduanya.

Maka dengan kondisi yang seperti ini penting bagi kita untuk menganalisis perbandingan aspek-aspek kunci pembangunan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Malaysia dan Indonesia agar dapat memahami pembangunan nasional di kedua negara. Dengan demikian tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis keempat sektor ini untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan pembangunan Indonesia dan Malaysia yang dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika pembangunan. Dengan menganalisis berbagai sumber

literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka teoretis yang kuat sebagai landasan analisis lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Perekonomian Antara Indonesia dengan Malaysia

Sistem ekonomi merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana suatu negara mengelola sumber daya ekonomi, mulai dari produksi barang dan jasa hingga distribusi dan konsumsinya. Fungsi utama sistem ekonomi adalah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

Indonesia telah mengadopsi sistem ekonomi Pancasila atau campuran, yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dan hukum perekonomiannya. Pasal 33 UUD 1945 secara khusus mengatur landasan politik perekonomian negara. Sistem ini menawarkan kebebasan yang cukup luas bagi individu untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang ekonomi. II

Setiap warga negara memiliki hak untuk memulai usaha sendiri, selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Namun, kebebasan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan negara untuk memastikan bahwa perekonomian berjalan secara adil dan merata. Di sisi lain, salah satu tantangan dari sistem ekonomi Pancasila adalah potensi terjadinya inefisiensi.

Proses pengambilan keputusan ekonomi seringkali memakan waktu yang lebih lama karena melibatkan berbagai pihak dan pertimbangan yang kompleks. Hal ini dikarenakan sistem ini mengutamakan prinsip demokrasi, di mana suara dan kepentingan seluruh komponen masyarakat harus diakomodasi. Meskipun demikian,

pendekatan yang demokratis ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sejak abad ke-19 hingga 1963, ekonomi Malaysia telah mengadopsi sistem campuran yang memadukan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah. Model ini kemudian terbagi menjadi dua sistem utama: sistem sara diri yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan; serta sistem komersial yang lebih terbuka terhadap investasi asing, teknologi baru, dan prinsip pasar bebas. Dengan pendekatan ini, pemerintah Malaysia memberikan ruang yang cukup luas bagi sektor swasta untuk berkembang, namun tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan nasional.

Salah satu ciri khas ekonomi Malaysia adalah peran pemerintah yang relatif terbatas dalam kegiatan ekonomi. Hal ini membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Namun, minimnya intervensi pemerintah juga membawa konsekuensi. Pemerintah harus menanggung beban yang lebih besar dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan pendapatan. Meskipun demikian, sistem ini juga memiliki sejumlah keunggulan, seperti pengakuan terhadap hak individu, fleksibilitas dalam penetapan harga, serta upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi campuran di Malaysia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, seperti halnya sistem ekonomi lainnya, sistem ini juga memiliki tantangan dan kompleksitas yang perlu diatasi secara terus-menerus. Pemerintah Malaysia perlu menyeimbangkan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan, serta memastikan bahwa sistem ekonomi tetap relevan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan negara Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia pada kuartal 1 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat masih di bawah negara-negara Filipina dan Vietnam, tetapi lebih baik Malaysia, Singapura dan Thailand. Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia akan terus meningkat meskipun banyak rintangan dari ketidakpastian global. Perbandingan sistem ekonomi negara Indonesia dan negara Malaysia tumbuh sebesar 4,2 % pada periode yang sama, melampaui 3,9 %. Pertumbuhan ini di dorong oleh peningkatan ekspor yang mulai pulih setelah mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut.

Pendapatan perkapita di negara Indonesia diperkirakan mencapai \$ 5.270 , adanya peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya walaupun Indonesia masih menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam meningkatkan perekonomian yang jauh lebih cepat. Pendapatan perkapita di negara Malaysia diperkirakan mencapai \$ 13.310 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Pendidikan Antara Indonesia dengan Malaysia

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Ia menjadi faktor utama dalam pembangunan peradaban, membuka peluang bagi masyarakat untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Ketiga aspek ini menentukan daya saing bangsa, khususnya dalam era ekonomi bebas di ASEAN. Pendidikan berfungsi untuk membimbing generasi muda dalam mencapai ketiga aspek tersebut, menjadikan pendidikan nasional sebagai sistem yang diselenggarakan oleh negara untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri.

Pendidikan juga krusial dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif dan siap bersaing di dunia internasional. Di era modern, pendidikan perlu mempersiapkan individu yang adaptif, sensitif, dan kritis terhadap tantangan serta

perubahan yang cepat. Oleh karena itu, kualitas pendidikan suatu bangsa berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakatnya. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan negara, pendidikan menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat dan kemajuan bangsa. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki sistem pendidikan yang kaya akan sejarah dan budaya dengan perkembangan yang unik. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, implementasi dan karakteristik sistem pendidikan di masing-masing negara menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terbagi menjadi tiga jalur utama. Pendidikan formal menawarkan struktur pembelajaran yang jelas dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan nonformal, lebih bersifat fleksibel, menyediakan berbagai jenis kursus dan pelatihan di luar lingkungan sekolah. Sementara itu, pendidikan informal terjadi secara alami dalam keluarga dan masyarakat, membentuk dasar pengetahuan dan keterampilan seseorang sejak dini.

Jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia mencakup: 1) Sekolah Dasar (SD) Pendidikan formal dasar selama 6 tahun, 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendidikan selama 3 tahun setelah SD, 3) Sekolah Menengah Atas (SMA) Pendidikan selama 3 tahun setelah SMP, 4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pendidikan formal dengan program kejuruan setara SMP/MTS, 5) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK): Pendidikan formal kejuruan di tingkat menengah, 6) Universitas Institusi pendidikan tinggi. Selain itu, jenis pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan umum, akademik, profesi, agama, dan pendidikan khusus.

Sistem pendidikan di Malaysia dirancang dengan tujuan membekali siswa dengan pengetahuan akademik yang solid dan nilai-nilai moral yang tinggi. Jenjang pendidikan di negara ini terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, pendidikan dasar yang berlangsung selama enam tahun. Setelah itu, siswa akan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama selama tiga tahun. Tahap akhir dari pendidikan menengah adalah pendidikan menengah atas yang juga berlangsung selama tiga tahun. Bagi siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas dan lulus ujian, mereka akan memperoleh sertifikat Cambridge. Sertifikat ini menjadi syarat penting bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, sistem pendidikan di Malaysia tidak hanya fokus pada penguasaan akademik, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

Di Malaysia juga, kurikulum nasional mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, dan nilai-nilai baik. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris, dengan bahasa Melayu dan Inggris sebagai bahasa utama dalam proses pendidikan. Pendidikan di Malaysia dan Indonesia memiliki esensi yang serupa dalam mengembangkan potensi siswa, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa, implementasi kurikulum, dan struktur pendidikan. Di Malaysia, prasekolah diakui secara resmi dan pendidikan dasar diwajibkan untuk anak usia 7 hingga 12 tahun. Di Indonesia, wajib belajar berlangsung dari usia 7 hingga 15 tahun. Perbedaan juga terlihat dalam jumlah pelajar asing, di mana Malaysia menarik lebih banyak pelajar internasional dibandingkan Indonesia.

Penulis memperoleh data melek huruf Indonesia sebesar 96,53%. Angka literasi Indonesia sebesar 99,76% per tahun 2021. Untuk Malaysia penulis memperoleh data tingkat literasi di Malaysia mencapai 95,71% per tahun 2021 dan Tingkat melek huruf 93,0%. Tingkat literasi diukur sebagai persentase individu berusia 15 tahun ke atas yang

mampu membaca, menulis, dan memahami pernyataan singkat serta sederhana mengenai kehidupan sehari-hari. Data tersebut didapat melalui Wikipedia dan Website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia.

Infrastruktur Antara Indonesia dan Malaysia

Infrastruktur Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan yang mencolok, baik dari segi pengembangan, kualitas, maupun cakupan. Berikut adalah beberapa poin perbandingan:

1. Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur di Indonesia bervariasi, dengan beberapa daerah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, memiliki infrastruktur yang lebih baik. Namun, wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan infrastruktur. Sedangkan Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih baik dan lebih modern, dengan jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi umum yang lebih terintegrasi dan terawat.

2. Transportasi

Sistem transportasi di Indonesia masih tergolong terfragmentasi. Meskipun ada kemajuan dalam proyek transportasi umum seperti MRT di Jakarta, banyak daerah masih bergantung pada transportasi pribadi. Sedangkan Malaysia memiliki sistem transportasi publik yang lebih baik, termasuk LRT, MRT, dan bus yang terintegrasi. Penyelenggaraan infrastruktur transportasi cenderung lebih terencana.

3. Koneksi Digital

Meskipun ada perkembangan dalam sektor digital, akses internet di daerah terpencil masih menjadi tantangan, dan kualitas layanan bisa bervariasi. Sedangkan Malaysia memiliki penetrasi internet yang lebih tinggi dan infrastruktur digital yang lebih baik, dengan program pemerintah yang mendukung pengembangan teknologi informasi.

5. Pendanaan dan Investasi

Investasi dalam infrastruktur meningkat, tetapi masih tergantung pada dana pemerintah dan investasi asing. Ada banyak proyek besar yang sedang berjalan, tetapi sering kali terhambat oleh birokrasi. Sedangkan Malaysia memiliki model pendanaan infrastruktur yang lebih mapan, dengan kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang lebih kuat.

6. Regulasi dan Kebijakan

Kebijakan infrastruktur sering kali dipengaruhi oleh politisasi dan birokrasi, yang dapat memperlambat pelaksanaan proyek. Sedangkan Kebijakan infrastruktur di Malaysia cenderung lebih stabil dan terencana, dengan pendekatan yang lebih konsisten dalam pengembangan jangka panjang.

Secara keseluruhan, Malaysia cenderung memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dan terintegrasi dibandingkan dengan Indonesia, meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar dan sedang dalam jalur pengembangan. Setiap negara memiliki tantangan dan keunggulan tersendiri dalam bidang infrastruktur yang perlu diperhatikan.

Kesehatan dalam Aspek Jaminan Sosial Antara Indonesia dan Malaysia

Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi, pemerintah telah mengesahkan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. SJSN dirancang sebagai sistem yang komprehensif, mencakup lima program utama yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengintegrasikan berbagai lembaga jaminan sosial yang ada sebelumnya di bawah satu atap, yaitu BPJS. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program-program jaminan sosial dapat lebih terkoordinasi dan efektif.

Sebelum hadirnya BPJS Kesehatan, akses masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan sangat terbatas akibat kendala finansial yang signifikan. Biaya pengobatan yang mahal seringkali menjadi beban berat bagi banyak keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis kronis. Proses pendaftaran asuransi kesehatan pun terbilang rumit dan birokratis. Masyarakat harus melalui berbagai tahap administrasi yang memakan waktu dan tenaga, mulai dari pengurusan dokumen di tingkat kelurahan hingga verifikasi data yang berbelit-belit. Namun, seiring dengan berdirinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014, lanskap layanan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Program jaminan sosial nasional ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status sosial ekonomi. Dengan skema iuran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta, BPJS Kesehatan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih jenis layanan yang sesuai. Bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah bahkan memberikan subsidi penuh atau sebagian untuk meringankan beban iuran. Kewajiban keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan, serta perluasan cakupan program.

BPJS Ketenagakerjaan didirikan pada tahun 2015, setahun setelah BPJS Kesehatan, sebagai pengganti Jamsostek. Sesuai dengan namanya, lembaga ini menawarkan perlindungan sosial khusus bagi para pekerja, baik yang terlibat dalam sektor formal maupun informal. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan berbagai manfaat, antara lain:

Program Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan peserta yang meninggal dunia. Melalui program ini, ahli waris akan menerima santunan tunai. Keunikan JKM adalah santunan ini diberikan tidak hanya untuk kasus kematian akibat kecelakaan kerja, tetapi juga untuk kematian yang terjadi karena sebab-sebab lain.

Pekerja di sektor formal memiliki perlindungan tambahan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Seluruh biaya program ini ditanggung oleh perusahaan. JKK memberikan jaminan komprehensif bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, mulai dari berangkat hingga pulang kerja. Cakupan risikonya pun beragam, termasuk kematian, cacat fisik, dan gangguan mental akibat kecelakaan kerja. Tujuannya adalah untuk mengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang akibat kecelakaan tersebut, serta menyediakan layanan rehabilitasi yang diperlukan.

Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perlindungan terhadap hilangnya penghasilan di masa tua yang tidak produktif. Umumnya, manfaat JHT diberikan sebagai jaminan pendapatan setelah peserta mencapai usia 55 tahun. Namun, dana JHT juga dapat dicairkan lebih awal jika peserta memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dengan memenuhi syarat tertentu.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah mewajibkan perusahaan konstruksi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerjanya, termasuk pekerja lepas, paruh waktu, dan borongan. Kewajiban ini tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi dua program utama yang harus diikuti oleh perusahaan konstruksi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian yang mungkin terjadi selama menjalankan proyek.

Konstitusi menjamin hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan sosial. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup berbagai jenis jaminan, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kesehatan. Meski demikian, harapan masyarakat akan perlindungan yang lebih baik melalui BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya terpenuhi. Pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian tujuannya.

Sebagai anggota Persemakmuran, Malaysia telah menjadi pelopor dalam pengembangan sistem jaminan sosial di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 1951, negara ini telah mewajibkan seluruh pekerja swasta dan pegawai negeri (kecuali yang menerima pensiun) untuk ikut serta dalam program tabungan hari tua, yaitu Employee Provident Fund (EPF). Program ini didasarkan pada Ordonansi EPF yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang EPF pada tahun 1991. Sementara itu, bagi pegawai pemerintah, jaminan hari tua mereka dipenuhi melalui sistem pensiun yang telah ada. Selain EPF, Malaysia juga memiliki lembaga khusus bernama Social Security Organization (SOCSO) yang mengelola program asuransi sosial lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja dan pensiun bagi penyandang cacat.

Setiap program jaminan sosial di Malaysia memiliki badan penyelenggara yang berbeda. Program Tabungan Pekerja (EPF) dikelola oleh Lembaga Tabungan Pekerja (CPF), sebuah lembaga tripartit di bawah Kementerian Keuangan. CPF melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan para ahli. Untuk keputusan investasi, CPF membentuk panel khusus. Sementara itu, pensiun pegawai negeri langsung ditangani oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari tunjangan mereka. Sedangkan program perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau cacat dikelola oleh SOCSO atau PERKESO.

Peserta program ini dapat menikmati berbagai manfaat. Saat memasuki masa pensiun atau mencapai usia 50 tahun, dana dapat ditarik untuk berbagai keperluan, termasuk modal usaha atau pembelian rumah. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cacat permanen atau meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan. Bahkan, peserta yang memutuskan untuk tinggal di luar negeri secara permanen juga dapat menarik dana mereka. Selain itu, program ini juga menyediakan fasilitas untuk menarik hasil pengembangan dana secara tahunan tanpa mengurangi pokok tabungan.

Pemerintah Malaysia telah berhasil menerapkan sistem kesehatan universal yang memberikan jaminan akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Dengan biaya yang sangat terjangkau, hanya 1 Ringgit Malaysia untuk konsultasi dokter umum dan 5 Ringgit Malaysia untuk dokter spesialis, masyarakat dapat memperoleh perawatan medis yang dibutuhkan. Walaupun demikian, penyakit serius dengan biaya pengobatan tinggi belum sepenuhnya ditanggung oleh sistem ini. Untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah Malaysia memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas alat kesehatan dan obat-obatan, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, para tenaga medis, khususnya dokter, diwajibkan untuk memilih satu tempat praktik, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dengan imbalan yang menarik. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat terjamin. Aksesibilitas pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas pemerintah. Semua fasilitas kesehatan milik pemerintah telah terakreditasi dan lokasinya sangat strategis, yakni tidak lebih dari 5 kilometer dari pemukiman penduduk. Sistem pembiayaan kesehatan yang sentralistik, di mana pajak langsung dibayarkan ke pemerintah pusat, juga memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk program kesehatan nasional.

KESIMPULAN

Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan terdiversifikasi dibandingkan Indonesia. Kebijakan investasi yang pro-bisnis di Malaysia berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih baik, sementara Indonesia menghadapi tantangan struktural yang menghambat pertumbuhan. Kualitas pendidikan di Malaysia lebih unggul dengan akses yang lebih merata, sedangkan Indonesia masih berjuang dengan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Reformasi pendidikan yang lebih inklusif di Malaysia telah menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

Malaysia telah berhasil membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, tercermin dari harapan hidup penduduk yang lebih panjang dan angka kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Sebaliknya, Indonesia, meski kaya akan sumber daya alam, masih berjibaku dengan penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Perbedaan ini semakin nyata dengan melihat infrastruktur kesehatan Malaysia yang lebih modern dan terintegrasi, hasil dari investasi yang lebih optimal. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi disparitas infrastruktur kesehatan yang mencolok, terutama di daerah-daerah terpencil.

REFERENSI

- Afida, N., Putri, D. R., Syahada, P., Juniant, R., & Ika. (2024). Studi Perbandingan Pendidikan: Sistem Pendidikan Di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Creative and Innovative Research*, 92-100.
- Apriani, N., Rusli, R. A., Nurhalizah, S., Ulpaija, S., Rohmah, T. N., & Mia Lasmi Wardiyah, S. M. (2024). SISTEM EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 596-613.
- Brillianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*.

Hara, A. E. (n.d.). Hubungan Malaysia dan Indonesia: dari Saudara Serumpun ke 'Smart Partnership'? 1-23.